

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan secara bertahap telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, diantaranya dengan meningkatkan kualitas guru melalui berbagai cara diantaranya, pemberian beasiswa dalam rangka melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2, melengkapi sarana dan prasarana belajar dengan memperbaiki gedung sekolah, melengkapi alat dan bahan laboratorium, melengkapi buku-buku di perpustakaan, meningkatkan manajemen pendidikan melalui workshop, pelatihan dan juga melalui jenjang pendidikan S1, S2 baik untuk kepala sekolah maupun pegawai administrasi, serta menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai indikator mutu pendidikan masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Menurut Ashaluddin Jalil Rektor Universitas Riau, dari tahun ke tahun calon mahasiswa asal Riau (tanpa merinci asal Kota/Kabupatennya) yang lulus melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk Universitas Riau jumlahnya sangat sedikit. Tahun 2009 hanya 16 persen calon mahasiswa baru lulus mengikuti SNMPTN untuk Universitas Riau (Riau Pos, 2011). Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi, dimana kalangan SMP merasa bekal lulusan SD kurang mampu untuk memasuki SMP dan kalangan SMA merasa lulusan SMP tidak siap mengikuti pembelajaran di sekolah menengah atas, kalangan perguruan tinggi merasa bekal lulusan SMA belum siap untuk mengikuti perkuliahan. Berdasarkan data dari Badan Standar Nasional tahun ajaran 2009/2010 tingkat kelulusan siswa SMA pada ujian nasional untuk Kota Dumai berada pada peringkat sembilan sedangkan Kabupaten Rokan Hilir berada pada peringkat enam dari 12 (dua belas) Kabupaten /Kota yang ada di Propinsi Riau. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya materi pelajaran yang belum dikuasai peserta didik dengan baik. Besarnya persentase penguasaan materi yang berada di bawah standar kelulusan pada ujian nasional untuk masing-masing bidang studi yang diuji dapat dilihat pada Table 1 untuk kelompok IPA dan Tabel 2 untuk kelompok IPS berikut ini.

Tabel 1. Persentase penguasaan materi ujian nasional yang belum mencapai standar kelulusan untuk kelompok IPA

No	Tahun	Kota/ Kabupaten	Mata Pelajaran					
			B.Ind	B.Ingg	Matem	Fisika	Kimia	Biologi
1	2007/2008	Dumai	12%	20%	2,5%	10%	5%	12,5%
		Rokan Hilir	26%	48%	35%	30%	32,5%	27,5%
2	2008/2009	Dumai	14%	6%	0%	5%	0%	20%
		Rokan Hilir	24%	30%	35%	32,5%	17,5%	40%
3	2009/2010	Dumai	22%	4%	2,5%	7,5%	12,5%	5%
		Rokan Hilir	10%	8%	0%	22,5%	7,5%	12,5%

Tabel 2. Persentase penguasaan materi ujian nasional yang belum mencapai standar kelulusan untuk kelompok IPS

No	Tahun	Kota/ Kabupaten	Mata Pelajaran					
			B. Ind	B.Ing	Matem	Ekonom	Geografi	Sosiologi
1	2007/2008	Dumai	34 %	42 %	47,5 %	12,5 %	57,5 %	22,5 %
		Rokan Hilir	26 %	36 %	22,5 %	15 %	50 %	15 %
2	2008/2009	Dumai	30 %	14 %	2,5 %	7,5 %	10 %	25 %
		Rokan Hilir	32 %	12 %	5 %	20 %	12,5 %	22,5 %
3	2009/2010	Dumai (A)	26 %	0 %	2,5 %	25 %	32 %	34 %
		Dumai (B)	10 %	6 %	7,5 %	15 %	30 %	30 %
		Rohil (A)	36 %	4 %	7,5 %	22,5 %	32 %	32 %
		Rokan Hilir(B)	14 %	12 %	7,5 %	15 %	30 %	18 %

Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penguasaan materi yang belum mencapai standar kelulusan (55%) berturut-turut dari tahun 2007/2008-2009-2010 adalah 2,5% sampai 48%; 0% sampai 40%; dan 0% sampai 22,5% untuk kelompok IPA, sedangkan untuk kelompok IPS lebih tinggi yaitu antara 12,5% sampai 57,5%; 2,5% sampai 32%; dan 0% sampai 36%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendidikan yang selama ini dilakukan belum

mampu memecahkan masalah dasar pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Solusi atas permasalahan pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir tersebut tentu perlu dicarikan. Semua pihak harus bertanggung jawab secara moral apa yang harus dilakukan dan terobosan apa yang harus dijalankan sehingga secepatnya dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan. Peran LPTK sangat menentukan terhadap kualitas pendidikan, karena LPTK merupakan lembaga penghasil tenaga guru. Selain LPTK, masih banyak pihak yang terlibat dalam mewujudkan pendidikan bermutu, di antaranya dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, MGMP, KKG, K3S, dan lainnya. Sinergi semua pihak diperlukan untuk memecahkan masalah ini.

Berdasarkan hal-hal di atas sesuai dengan kebijakan pemerintah dan penyediaan dana melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dilaksanakan penelitian **Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Kota Dumai dan Rokan Hilir Provinsi Riau.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil peta kompetensi peserta didik yang belum mencapai standar kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) ?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab tidak dikuasainya kompetensi tersebut oleh peserta didik ?
3. Bagaimana rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik ?
4. Bagaimana model implementasi pemecahan masalah dengan menyertakan berbagai institusi terkait ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap peta kompetensi peserta didik yang belum mencapai standar kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional).
2. Mengungkap faktor penyebab tidak dikuasainya kompetensi tersebut oleh peserta didik.
3. Menentukan rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
4. Menentukan model implementasi pemecahan masalah dengan menyertakan berbagai institusi terkait.

D. Luaran/ Manfaat Penelitian

Penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Data mengenai kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik untuk mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional).
2. Faktor-faktor penyebab peserta didik belum mekuasai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut untuk mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional).
3. Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap diimplementasikan secara konkret melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Proses dan Sistem Pendidikan Nasional

1. Proses Pendidikan

Kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan merupakan proses pendidikan. Bagaimana proses pendidikan dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan (Umar, 1994).

Kualitas proses pendidikan tergantung pada dua aspek yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Walaupun komponen-komponennya cukup baik, seperti tersedianya prasarana dan sarana serta biaya yang cukup, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, maka tujuan tidak akan tercapai secara maksimal. Demikian pula sebaliknya pengelolaan yang baik dengan kondisi serba kekurangan akan mengakibatkan hasil yang tidak maksimal.

Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Pengelolaan proses dalam lingkup makro berupa kebijakan-kebijakan pemerintah, pengelolaan dalam ruang lingkup meso merupakan implikasi kebijakan-kebijakan nasional kedalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah tanggungjawab Dinas Pendidikan, dan pengelolaan dalam lingkup mikro merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah ataupun kelas dan satuan-satuan pendidikan lainnya. Dalam ruang lingkup ini kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik memegang peranan penting didalam pengelolaan pendidikan untuk menciptakan kualitas proses dan pencapaian hasil pendidikan.

Yang menjadi tujuan utama pengelolaan proses pendidikan adalah terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Sebab berkembangnya tingkah laku peserta didik sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal. Pengelolaan proses pendidikan harus memperhitungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin pesat tidak mungkin lagi para pendidik (khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik. Disamping tidak mungkin, mungkin juga tidak perlu karena kemampuan manusia yang terbatas untuk menampung ilmu. Oleh karena itu setiap guru wajib mengikuti dengan seksama inovasi-inovasi pendidikan, terutama yang didesiminasikan secara meluas oleh departemen pendidikan seperti Belajar berpusat pada peserta didik, Belajar melalui berbuat, Belajar tuntas (*Mastery Learning*), mengembangkan kreatifitas, kontekstual, pemecahan masalah, menyenangkan dan menantang.

2. Sistem Pendidikan Nasional

Pembangunan bidang pendidikan di Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat sejak diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, “Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang, dan akt saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”

Semua jalur pendidikan dalam fungsi, proses, dan aktivitasnya, harus bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dinyatakan, “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Konsekuensinya adalah seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut dalam wujud manusia Indonesia seutuhnya.

Sebagai suatu subsistem dari sistem nasional, pendidikan dipengaruhi oleh budaya, kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kependudukan, politik dan keamanan. Disamping itu, sebagai sistem tersendiri pendidikan nasional merupakan sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Tenaga guru dan non guru, administrasi, kurikulum, prasarana dan sarana, serta anggaran sebagai faktor

internal, senantiasa dipengaruhi lingkungan eksternal. Hubungan antar subsistem dalam sistem pendidikan nasional menurut Umar (1994) dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Sistem Pendidikan Nasional

Secara sistematis, semua subsistem dalam sistem nasional berkolaborasi dengan subsistem pendidikan. Subsistem yang mencakup berbagai aspek kehidupan nasional, khususnya politik, ekonomi, hukum dan budaya turut menentukan pemberdayaan sistem pendidikan nasional.

Ekonomi nasional mempengaruhi daya kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Politik juga mempengaruhi pendidikan karena lemahnya daya tawar pelaku politik dengan birokrasi yang menjadikan pembangunan pendidikan sebagai program terpinggirkan. Selama ini lembaga legislatif belum memiliki kemauan untuk memperjuangkan pendidikan bermutu. Demikian halnya pendidikan dengan budaya, ternyata masyarakat belum memiliki kemampuan sosial dan kultural dalam memberdayakan pendidikan. Lingkungan eksternal menuntut nilai-nilai baru, seperti kerja keras, disiplin, keunggulan, dan toleransi, tetapi budaya belum memberikan dukungan bagi pendidikan nasional.

Bagaimanapun kompleksnya tantangan pendidikan nasional yang dihadapi, namun pengelola pendidikan harus sungguh-sungguh dan konsisten dalam

melaksanakan perbaikan berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya menciptakan manusia pintar dan terampil, tetapi juga beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berbudaya. Demikian pula pendidikan nasional bukan hanya berorientasi kepentingan lokal, melainkan juga kepentingan nasional bahkan juga keperluan global untuk perdamaian dunia yang lebih adil.

Terbentuknya suatu sistem yang baik ditunjang oleh sub-sub sistem yang baik. Tetapi subsistem yang baik saja belum menjamin tujuan sistem secara optimal, manakala subsistem tersebut tidak berhubungan secara fungsional dengan subsistem yang lain.

B. Mutu Pendidikan Di Indonesia

Dalam konteks pendidikan, peralihan era industri ke era informasi memunculkan hubungan yang berlawanan. Hal itu terlihat tidak hanya antara guru dan administrator, tetapi juga antara guru dan peserta didik dan sering pula antara orang tua dan guru. Demikian pula kepemimpinan, struktur tugas, komunikasi dan kerjasama yang kurang kondusif dalam era industrialisasi bagi pemberdayaan pendidikan beralih kepada otonomi, kepemimpinan partisipatif, dan mandiri. Reigeluth dan Garfinkle (1994) menggambarkan perbedaan antara fenomena era industri dan era informasi yang mempengaruhi pendidikan sebagai berikut.

Era Industri	Era Informasi
Hubungan-permusuhan	Hubungan-kerjasama
Organisasi birokratis	Organisasi tim
Kepemimpinan otokratis	Kepemimpinan bersama
Pengawasan terpusat	Otonomi dan akuntabilitas
Otokrasi	Demokrasi
Demokrasi perwakilan	Demokrasi partisipatif
Kerelaan	Inisiatif
Komunikasi satu arah	Jaringan Kerjasama
Kompartemen/Pembagian Kerja	Holisme/integrasi tugas

Di era globalisasi, dunia pendidikan kita terlihat masih kurang siap menghadapi besarnya tantangan terhadap masa depan. Berdasarkan laporan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berkedudukan di Hongkong, sebagaimana dimuat dalam *The Jakarta Post* (Vol.19, No.127:2011), diungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah yang terburuk di Asia. Mutunya masih dibawah negara Vietnam dan negara-negara tetangga di Asia. Demikian pula sebelumnya, *Asia Week* (1999), memuat laporan

terpuruknya mutu pendidikan tinggi Indonesia dibanding negara-negara di Asia, Australia, dan Selandia Baru. Semua kelemahan dalam pengelolaan pendidikan nasional di Indonesia setelah kita merdeka 66 tahun perlu dievaluasi. Demikian pula faktor-faktor yang menyebabkan mutu pendidikan nasional rendah perlu diselesaikan. Menurut laporan Bank Dunia (Jalal dan Supriadi, 2001), ada empat faktor yang diidentifikasi menjadi penghambat mutu pendidikan di Indonesia, yaitu :

- 1) Kompleksitas pengorganisasian pendidikan antara Depdiknas (bertanggung jawab dalam hal materi pendidikan, evaluasi buku teks dan kelayakan bahan-bahan ajar) dan Depdagri dalam bidang (ketenagaan, sumberdaya material, dan tanggung jawab dan peranan manajerial, keterlambatan dan terpilihnya sistem pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru.
- 2) Praktik manajemen yang sentralistik pada tingkat sekolah menengah. Pembiayaan dan perencanaan oleh pemerintah pusat yang melibatkan banyak departemen. Hal itu menghambat pencapaian tujuan wajib belajar.
- 3) Praktik penganggaran yang terpecah dan kaku. Kompleksitas organisasi yang menyiapkan anggaran pembangunan menjadikan rumitnya pengelolaan pendidikan. Akibatnya, hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu tidak adanya tanggung jawab yang jelas antar unit, tidak ada evaluasi reguler terhadap kebutuhan riil, dan tidak ada jaminan dana yang dialokasikan secara benar dan merata.
- 4) Manajemen sekolah yang tidak efektif. Sebagai pelaku utama, Kepala sekolah banyak yang kurang mampu melakukan peningkatan mutu sekolahnya karena tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik. Pelatihan yang kurang dan rekrutmen kepala sekolah yang belum didasarkan atas kemampuan memimpin dan profesionalitas.

Secara umum Edward, Sallis (1993) menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur (manajemen), tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan kurangnya pengembangan staf.

Menurut Syafaruddin (2002), faktor yang menyebabkan mutu pendidikan rendah terletak pada unsur-unsur dari sistem pendidikan itu sendiri, yakni kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, manajemen sekolah, pembiayaan pendidikan, dan kepemimpinan. Disamping itu, faktor eksternal berupa partisipasi politik rendah, ekonomi tak berpihak terhadap pendidikan, sosial budaya, rendahnya pemanfaatan sains dan teknologi juga mempengaruhi mutu pendidikan.

C. Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Bangsa kita saat ini mulai menyadari berbagai kesalahan dimasa lalu. Kini berupaya menyiapkan upaya reformasi pendidikan nasional untuk mengubah kinerja pelaksana pendidikan selama ini. Kesalahan-kesalahan kebijakan pendidikan pada masa lalu perlu segera diperbaiki dan diubah dengan pengelolaan yang lebih baik. Rick (1988) berpendapat bahwa reformasi bertujuan untuk memperbaiki penyalahgunaan, kesalahan atau ketidakcocokan, kemudian membuat perubahan yang lebih baik (*to make changes the better*). Tujuan utama reformasi pendidikan nasional adalah membangun suatu sistem pendidikan nasional yang lebih baik dan lebih maju dengan memberdayakan seoptimal mungkin potensi daerah dan partisipasi masyarakat.

Otonomi pendidikan merupakan suatu bentuk reformasi yang perlu dijalankan dengan baik. Dengan reformasi, perbaikan kualitas pendidikan menuntut tingginya kinerja lembaga pendidikan dengan mengacu pada perbaikan mutu yang berkelanjutan, kreativitas, dan produktivitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, guru, tata usaha, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan lain sebagainya unsur masukanya). Kualitas bukan saja pada unsur masukan (input), tetapi juga unsur proses, terutama pada unsur keluaran (output) atau lulusan, agar dapat memuaskan harapan masyarakat pengguna pendidikan.

Kepala sekolah sebagai manajer sudah saatnya mengoptimalkan mutu kegiatan pembelajaran untuk memenuhi harapan kita semua. Fungsi sekolah adalah membina peserta didik menjadi kreatif dan inovatif, sehingga lulusannya memenuhi kebutuhan masyarakat. Manajer pendidikan dituntut mencari dan menerapkan suatu strategi manajemen baru yang dapat mendorong perbaikan mutu di sekolah di abad baru ini.

Abad-21 merupakan momentum yang penuh tantangan bagi negara-negara di dunia terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kita perlu mencari model pengembangan pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan. Kita boleh saja mempelajari usaha-usaha di bidang pendidikan yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang dan Inggris.

UNESCO (1996) dalam buku *Learning: The Treasure Within* telah merancang empat pilar pendidikan abad ke-21 yang perlu diterapkan konsepnya dalam pendidikan nasional, yaitu: (1) belajar untuk mengetahui (*learning to know*), (2) belajar untuk melakukan sesuatu/belajar terampil (*learning to do*), (3) belajar untuk menjadikan seseorang/pribadi (*learning to be*), dan (4) belajar untuk menjalani kehidupan bersama (*learning live together*). Dalam konteks ke-Indonesiaan, sistem pendidikan nasional berkewajiban mempersiapkan setiap warga negara agar dapat berperan aktif dalam lapangan

kehidupan dengan cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, dan moral tinggi, demokratis, dan toleransi dengan mengutamakan persatuan bangsa (Syafaruddin, 2002).

Paul Oliver (1996) berpendapat bahwa tak dapat dihindarkan semua perubahan pendidikan memerlukan partisipasi lingkungan. Para guru harus bekerja sama satu sama lain, bahkan dengan para peserta didik agar terjadi perubahan kinerja. Seorang manager harus berfungsi sebagai bagian kerja sama kelembagaan agar dapat menjamin keberhasilan perubahan dalam suatu lingkungan pendidikan kontemporer.

Budaya sekolah harus diubah oleh kepala sekolah bersama guru, orang tua, dewan sekolah. Dengan begitu sekolah akan memiliki keseimbangan secara baik antara kemungkinan stabilitas dan stagnasi atau kemajuan. Sikap antisifatif, kreatif, inovatif, dan proaktif perlu dimiliki manajer pendidikan. Sikap itu pada hakikatnya merupakan tindakan merencanakan dan mengarahkan perubahan sesuai visi untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan juga dituntut dalam persaingan globalisasi untuk tidak mengabaikan mutu lulusannya agar jangan sampai ketinggalan zaman.

Pemberlakuan otonomi daerah di bawah payung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut para manajer atau pengelola lembaga pendidikan, khususnya kepala sekolah untuk mengadopsi manajemen mutu terpadu bagi peningkatan mutu lulusan yang dipimpinnya. Aplikasi paradigma baru manajemen pendidikan terbuka luas dengan adanya otonomi sekolah. Sudah saatnya dunia pendidikan Indonesia memperhatikan peningkatan mutu sebagai bagian dari perubahan manajemen pendidikan.

Kepala sekolah harus lebih mandiri dan mengembangkan otonomi untuk menggali semua sumber daya sekolah. Pemberdayaan sekolah dalam era otonomi tentu perlu diiringi tanggung jawab yang tinggi. Adapun yang penting bagi kepala sekolah adalah cita-cita tinggi dengan menyadari bahwa banyak yang harus dilakukan bersama guru-guru dalam menentukan suatu perubahan yang menyenangkan.

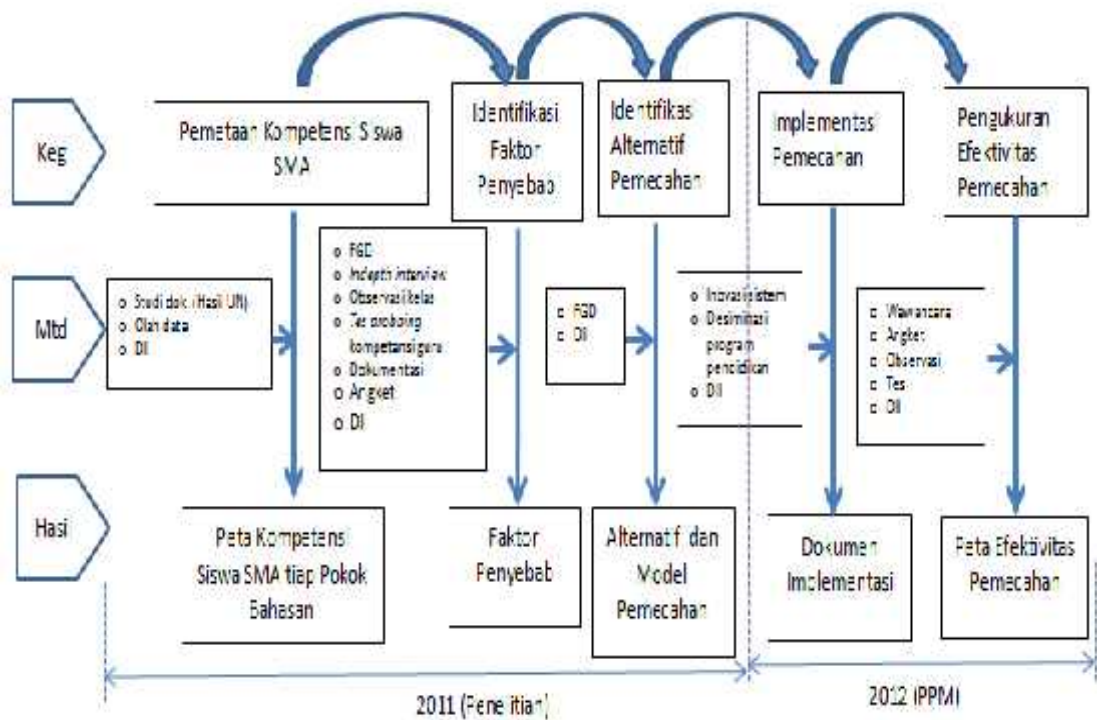
Uraian diatas menunjukkan bahwa perbaikan mutu pendidikan melibatkan semua pihak, karena perbaikan pendidikan bukan tanggung jawab menteri pendidikan saja, atau dirjen, rektor, dekan, dan kepala sekolah saja. Semua pihak yang terkait dengan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan bertanggung jawab untuk membenahi pendidikan (Syafaruddin,2002).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) dan dilaksanakan dengan metode survey. Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada daerah tertentu.

Penelitian ini mengacu pada kerangka dasar peningkatan mutu pendidikan yang dirancang oleh Dirjen Dikti Kepnas seperti tertera pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Kerangka Dasar Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir

Untuk memperjelas kerangka dasar pelaksanaan penelitian di atas, maka masing-masing tahap secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemetaan Kompetensi Siswa

Tujuan tahap ini adalah untuk memetakan kompetensi dasar yang tidak mencapai standar kelulusan pada setiap mata pelajaran yang diuji secara nasional. Pemetaan ini dilakukan dengan menganalisis hasil ujian nasional dari tahun 2007/2008– 2009/2010. Dari

hasil analisis didapatkan kompetensi yang diuji yang mencapai nilai standar kelulusan dan yang tidak mencapai nilai standar kelulusan. Untuk kompetensi yang diuji yang nilainya tidak mencapai standar kelulusan, soal-soalnya dianalisis serta ditentukan kompetensi dasar berdasarkan standar isi sehingga didapatkan karakteristik dari kompetensi dasar tersebut.

2. Identifikasi Faktor Penyebab

Tujuan tahap ini adalah untuk menentu faktor-faktor penyebab tidak dikuasainya kompetensi tersebut oleh peserta didik. Kegiatan ini dimulai setelah kompetensi yang tidak dikuasai dipetakan dan masing-masing kompetensi sudah dianalisis dan ditentukan karakteristiknya. Kegiatan pada tahap ini meliputi pengambilan data ke lapangan sesuai dengan instrumen penelitian yang sudah disusun, mengolah data, dan hasil/temuan penelitian.

a. Pengambilan Data

Setelah sekolah sampel ditetapkan, maka masing-masing anggota tim peneliti mengunjungi setiap sekolah sampel untuk mengumpulkan data. Masing-masing anggota tim sesuai dengan bidang studi dengan menggunakan angket mengumpulkan data tentang guru, respon siswa terhadap pembelajaran dan mengobservasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru menggunakan lembar observasi serta mengumpulkan silabus dan RPP yang dibuat guru. Disamping itu ketua tim juga mengumpulkan angket yang diisi kepala dan wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, dan guru konseling. Setelah anggota tim selesai mengerjakan tugas masing-masing, maka diadakan diskusi antara seluruh anggota tim dengan guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, serta tenaga kependidikan.

b. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul semua, anggota tim mengolah data mereka masing-masing dan baru kemudian mengumpulkan kepada ketua tim untuk disatukan dan didiskusikan.

c. Hasil/Temuan Penelian

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat keadaan sekolah masing-masing dan kemudian dapat ditentukan faktor-faktor penyebab tidak dikuasai kompetensi dasar oleh peserta didik.

3. Identifikasi Alternatif Pemecahan

Identifikasi alternatif pemecahan masalah dilakukan setelah temuan-temuan penelitian di lapangan dianalisis dengan seksama berdasarkan data yang diperoleh.

4. Model Implementasi Pemecahan masalah

Model implementasi Pemecahan Masalah ditentukan setelah permasalahan-permasalahan di lapangan diidentifikasi. Model implementasi disesuaikan dengan keadaan, yaitu program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim peneliti sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi.

B. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Nilai total yang diperoleh semua sekolah yang ada di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir pada ujian nasional untuk setiap mata pelajaran dari tahun 2007/2008-2009/2010 diurut dari yang tinggi ke yang rendah .
2. Dari urutan itu, sekolah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu sekolah yang mempunyai nilai total tinggi, sedang, dan rendah. Ternyata sekolah yang berada pada masing-masing kelompok untuk tiga tahun tersebut hampir sama. Dari masing-masing kelompok dipilihlah sekolah yang akan menjadi sampel dengan beberapa pertimbangan terutama dengan alasan lokasi mudah dicapai.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan standar isi, yaitu dokumen KTSP dan standar proses, seperti Silabus untuk sembilan mata pelajaran yang diuji secara nasional dan RPP setiap guru untuk tiap mata pelajaran.

2. Angket

Angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Serta angket respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan guru

3. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tentang proses belajar mengajar yang dilakukan guru dengan menggunakan lembar observasi.

4. Wawancara/diskusi

Wawancara dan diskusi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang mendalam dan jelas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang belum tertuang dalam angket dan lembar observasi.

D. Teknik Analisis Data

1. Data hasil ujian nasional tentang daya serap siswa dari Pusat Penilaian Pendidikan BSNP yang tersedia diolah dan dibuatkan petanya untuk tiga sekolah sampel. Dari peta ini, akan terlihat kompetensi yang nilainya mencapai standar kelulusan dan yang tidak mencapai standar kelulusan. Kompetensi-kompetensi yang tidak mencapai standar kelulusan dianalisis dengan melihat soal-soal ujian masing-masing kemudian dipetakan terhadap kompetensi dasar yang terdapat di standar isi. Dari hasil analisis didapatkan karakteristik dari kompetensi yang tidak dikuasai oleh peserta didik.
2. Data hasil wawancara, kuesioner dan observasi dilakukan analisis deskriptif untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data dari langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase, tabel, dan grafik dan gambar. Proses kategorisasi dan klasifikasi data kualitatif dilakukan secara bertahap atas jawaban-jawaban responden dan hasil identifikasi dianalisis menggunakan Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai profil peta kompetensi dasar peserta didik yang belum mencapai standar kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diuji secara nasional, faktor penyebab tidak dikuasainya kompetensi tersebut, alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, model implementasi pemecahan masalah.

A. Profil Sekolah Sampel

Sebelum profil kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang tidak mencapai standar kelulusan pada ujian nasional di petakan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan profil ketiga sekolah sampel.

1. SMA Negeri I Dumai

Lokasi SMA Negeri I Dumai berada di areal Perusahaan Minyak Cevron. Gedung sekolah berbatasan langsung dengan kantor divisi perusahaan, sehingga air dan listrik langsung dialirkan dari sana. Fasilitas sekolah lainnya juga dibangun/disediakan oleh perusahaan, yang dulunya Caltex dan sekarang Cevron.

Guru yang mengajar disini masih ada yang berijazah dibawah S1/D4 dan mengajar sudah sesuai dengan bidang studi tetapi pelatihan/seminar yang diikuti kebanyakan tingkat lokal dan MGMP serta sebahagian guru sudah memiliki sertifikat pendidik

Kepala sekolah berpendidikan S1 dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas 1-4 kali dalam satu semester dan tidak disertai diskusi/ tidak ada tindak lanjut dari hasil pantauan. Di sekolah ini masalah manajerial sekolah yang seharusnya ditangani oleh kepala sekolah tapi diselesaikan oleh wakil kepala sekolah, hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan manajerial kepala sekolah dan kepala sekolah merupakan putra daerah.

Di sekolah ini hanya kepala tenaga administrasi yang mempunyai staf tetapi untuk perpustakaan dan laboratorium kepala merangkap staf. Disamping itu yang menjadi kepala

laboratorium dan kepala perpustakaan adalah guru bidang studi yang tidak menjabat sebagai guru kelas.

Luas lahan minimal yang dimiliki sekolah tidak sebanding dengan rasio jumlah siswa dan belum mempunyai ruang khusus yang dibuat untuk perpustakaan. Perpustakaan hanya berisi beberapa rak buku yang berisi beberapa buku, beberapa meja dan kursi untuk siswa membaca buku. Buku-buku yang tersedia juga tidak banyak baik dari segi jumlah maupun dari segi judul dan terlihat sudah usang dan kurang sesuai dengan tuntutan materi yang akan diajarkan. Perpustakaan terlihat tidak ramai dikunjungi oleh siswa, karena kondisi ruangan yang kurang nyaman dengan ruangan yang sedikit gelap dan hampir tidak ada yang menjalankan piket pustaka.

Laboratorium yang dimiliki hanya laboratorium IPA tetapi kapasitas isi ruang laboratorium IPA serta sarana pendukung tidak sesuai dengan ketentuan. Ruang laboratorium hanya satu, untuk mata pelajaran kimia, fisika, dan biologi serta sudah mempunyai ruang pimpinan, guru, TU, konseling, UKS tetapi luas ruangan dan sarana pendukungnya tidak sesuai ketentuan.

2. SMA Negeri 2 Tanah Putih

Lokasi SMA Negeri 2 Tanah Putih berada di daerah perbatasan propinsi Riau dengan propinsi Sumatra Utara, merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dan karet serta kebanyakan penduduknya merupakan buruh perkebunan.

Guru yang mengajar disini masih ada yang berijazah dibawah S1/D4 dan ada yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studi, sebahagian guru sudah memiliki sertifikat pendidik dan sebahagian yang lain belum.

Kepala sekolah berpendidikan S1 dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas 1-4 kali dalam satu semester dan tidak disertai diskusi/ tidak ada tindak lanjut dari hasil pantauan.

Di sekolah ini kepala tenaga administrasi merangkap staf, tidak ada kepala perpustakaan dan kepala laboratorium karena sekolah belum mempunyai ruang perpustakaan dan ruang laboratorium.

Luas lahan minimal yang dimiliki sekolah tidak sebanding dengan rasio jumlah siswa dan belum mempunyai ruang khusus untuk pimpinan, guru, TU, konseling dan UKS tetapi suatu ruangan yang disekat-sekat sesuai dengan keperluan.

3. SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan

Lokasi SMA Negeri 2 Tanah Putih berada juga berada di daerah perbatasan propinsi Riau dengan propinsi Sumatra Utara, juga merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dan karet dan penduduknya merupakan buruh perkebunan.

Guru yang mengajar disini masih ada yang berijazah dibawah S1/D4 dan ada yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studi, misalnya guru bidang studi Bahasa mengajar Fisika, guru bidang studi bahasa mengajar Sosiologi, sebahagian guru sudah memiliki sertifikat pendidik dan sebahagian yang lain belum.

Kepala sekolah berpendidikan S1 dan sudah memiliki sertifikat pendidik. Kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas 1-4 kali dalam satu semester dan tidak disertai diskusi/ tidak ada tindak lanjut dari hasil pantauan, pantauan seakan-akan hanya sebatas melengkapi administrasi.

Di sekolah ini kepala tenaga administrasi merangkap staf, tidak ada kepala perpustakaan dan kepala laboratorium karena sekolah belum mempunyai ruang perpustakaan dan ruang laboratorium.

Luas lahan minimal yang dimiliki sekolah tidak sebanding dengan rasio jumlah siswa dan belum mempunyai ruang khusus untuk pimpinan, guru, TU, konseling dan UKS tetapi suatu ruangan yang disekat-sekat sesuai dengan keperluan.

B. Profil Kompetensi Dasar Masing-Masing Mata Pelajaran Yang Tidak Mencapai Standar Kelulusan Pada Ujian Nasional

Di bawah ini akan diuraikan profil kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang tidak mencapai standar kelulusan pada ujian nasional pada tahun 2007/2008-2009/9010 untuk kelompok IPA dan kelompok IPS di tiga sekolah sampel.

1. Kelompok IPA

Persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan berdasarkan daya serap untuk kelompok IPA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 Persentase Jumlah Kompetensi Yang Belum Mencapai Standar Kelulusan Untuk Kelompok IPA Di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun Pelajaran	Kota / Kabupaten	Persentase KD Yang Belum Mencapai KKM					
			B. Indo	B. Ingg	Matem	Fisika	Kimia	Biologi
1	2007/2008	Dumai (SMA N 1)	12%	20%	2,5%	10%	5%	12,5%
		Tanah Putih (SMAN 2)	26%	48%	35%	30%	32,5%	27,5%
		Tanah Putih Tanjung Melawan (SMAN 1)	36%	50%	32,5%	37,5%	37,5%	40%
2	2008/2009	Dumai (SMA N 1)	14%	6%	0%	5%	0%	20%
		Tanah Putih (SMAN 2)	24%	30%	35%	32,5%	17,5%	40%
		Tanah Putih Tanjung Melawan (SMA N 1)	36%	68%	15%	15%	20%	42,5%
3	2009/2010	Dumai (Paket A) (SMA N 1)	22%	4%	2,5%	7,5%	12,5%	5%
		Dumai (Paket B) (SMA N 1)	10%	8%	0%	22,5%	7,5%	12,5%
		Tanah Putih(Paket A) (SMAN 2)	24%	10%	30%	35%	37,5%	35%
		Tanah Putih(Paket B) (SMAN 2)	24%	30%	30%	40%	22,5%	35%
		Tanah Putih Tanjung Melawan (Paket A) (SMA N 1)	32%	8%	17,5%	20%	15%	7,5%
		Tanah Putih Tanjung Melawan (Paket B) (SMA N 1)	26%	12%	2,5%	42,5%	5%	10%

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan berdasarkan daya serap untuk kelompok IPA pada tiga sekolah sampel berturut-turut dari tahun 2007/2008- 2009/2010 adalah 2,5% sampai 50%; 0% sampai 68%; dan 0% sampai 42,5%. Kalau dilihat jumlah persentase kompetensi yang dibawah standar kelulusan pada kelompok IPA secara umum menunjukkan penurunan.

Dari hasil analisis, juga ditemukan bahwa umumnya kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan sama, bisa sama untuk ketiga sekolah atau untuk dua sekolah misalnya, untuk mata pelajaran geografi kompetensi yang tidak dikuasai adalah “Membedakan jenis tanah antar pulau di Indonesia”. Kompetensi ini tidak dikuasai oleh ketiga sekolah sampel dan kompetensi , “menentukan titik henti antara dua kota berdasarkan data gambar” tidak dikuasai oleh dua sekolah sample serta kompetensi “menentukan kota berdasarkan sejarah pertumbuhannya” tidak dikuasai oleh salah satu sekolah sampel. Kompetensi yang tidak dikuasai oleh peserta didik tersebut umumnya sama, misalnya untuk pelajaran kimia pada tahun 2007/2008-2008/2009 kompetensi tentang konfigurasi elektron

tidak mencapai nilai kelulusan untuk tapi untuk tahun berikutnya sudah. Hal ini disebabkan karena guru sudah tahu bahwa materi tersebut masuk ujian nasional sehingga pembelajaran yang dilakukan sudah diperbaiki. Tetapi untuk kompetensi yang berhubungan dengan praktek di laboratorium tidak karena mereka memang tidak bias melakukan praktikum karena tidak ada laboratorium.

Pada mata pelajaran bahasa Indonesia persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 12%; 26%; dan 36% pada tahun 2008/2009 adalah 14%; 24%, 36% serta pada tahun 2009/2010 adalah 22% untuk paket A dan 10% untuk paket B; 24% untuk paket A dan B; 32% untuk paket A dan 26% untuk paket B.

Pada mata pelajaran bahasa Inggris persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 20%; 48%; dan 50% pada tahun 2008/2009 adalah 6%; 30%, 68% serta pada tahun 2009/2010 adalah 4% untuk paket A dan 8% untuk paket B; 10% untuk paket A dan 30% untuk paket B; 17,5 untuk paket A dan 2,5% untuk paket B.

Pada mata pelajaran matematika persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 2,5%; 3,5%; dan 32,5% pada tahun 2008/2009 adalah 0%; 35%, 15% serta pada tahun 2009/2010 adalah 25% untuk paket A dan 0% untuk paket B; 30% untuk paket A dan B; 17,5% untuk paket A 25% dan untuk paket B juga 2,5%.

Pada mata pelajaran fisika, persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan

sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 10%; 30%; dan 37,5% pada tahun 2008/2009 adalah 5%; 32,5%, 15% serta pada tahun 2009/2010 adalah 7,5% untuk paket A dan 22,5% untuk paket B; 35% untuk paket A dan 40% untuk paket B; 20% untuk paket A dan 42,5% untuk paket B.

Pada mata pelajaran kimia, persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 5%; 32,5%; dan 37,5% pada tahun 2008/2009 adalah 0%; 17,5%, 20% serta pada tahun 2009/2010 adalah 12,5% untuk paket A dan 37,5% untuk paket B; 22,5% untuk paket A dan 22,5 untuk paket B; 15% untuk paket A dan 5% untuk paket B.

Pada mata pelajaran biologi persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 12,5%; 2,5%; dan 40% pada tahun 2008/2009 adalah 20%; 40%, 44,5% serta pada tahun 2009/2010 adalah 5% untuk paket A dan 12,5% untuk paket B; 35% untuk paket A dan B; 7,5% untuk paket A 10% dan 10% untuk paket B.

2. Kelompok IPS

Tabel. 2 Persentase Kompetensi Yang Belum Mencapai Standar Kelulusan Untuk Kelompok IPS Di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun Pelajaran	Kota / Kabupaten	Persentase KD Yang Belum Mencapai KKM					
			B. Indo	B. Ingg	Matem	Eko	Geog	Sos
1	2007/2008	Dumai (SMAN 1)	22%	22%	32,5%	5%	25%	17,5%
		Tanah Putih (SMAN 2)	26%	46%	32,5%	40%	62,5%	35%
		Tanah Putih Tanjung Melawan (SMAN 1)	36%	48%	37,5%	30%	35%	37,5%
2	2008/2009	Dumai (SMAN 1)	14%	8%	0%	10%	12,5%	17,5%
		Tanah Putih (SMAN 2)	28%	38%	25%	30%	32,5%	42,5%
		Tanah Putih Tanjung Melawan (SMAN 1)	38%	80%	32,5%	37,5%	40%	50%
3	2009/2010	Dumai (Paket A)	26%	0%	2,5%	25%	32%	32%

	(SMAN 1)						
	Dumai (Paket B) (SMAN 1)	10%	6%	5%	20%	30%	30%
	Tanah Putih(Paket A) (SMAN 2)	28%	10%	17,5%	40%	38%	38%
	Tanah Putih(Paket B) (SMAN 2)	26%	44%	17,5%	47,5%	32%	34%
	Tanah Putih Tanjung Melawan (Paket A) (SMAN 1)	32%	8%	7,5%	27,5%	26%	30%
	Tanah Putih Tanjung Melawan (Paket B) (SMAN 1)	28%	12%	7,5%	25%	26%	24%

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan berdasarkan daya serap untuk kelompok IPS pada tiga sekolah sampel berturut-turut dari tahun 2007/2008- 2009/2010 adalah 2% sampai 50%; 0% sampai 68%; dan 0% sampai 42,5%. Kalau dilihat jumlah persentase kompetensi yang dibawah standar kelulusan pada kelompok IPA secara umum menunjukkan penurunan.

Dari hasil analisis, juga ditemukan bahwa umumnya kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan sama, bisa sama untuk ketiga sekolah atau untuk dua sekolah misalnya, untuk mata pelajaran kimia kompetensi yang tidak dikuasai adalah “Memilih pasangan data nama unsur dan kegunaannya yang berhubungan dengan tepat”. Kompetensi ini tidak dikuasai oleh ketiga sekolah sampel, kompetensi, “menentukan nama proses pengolahan untuk memperoleh unsure tertentu” tidak dikuasai oleh dua sekolah sampel dan “menentukan massa zat yang mengendap pada satu kutub jika parameternya diketahui” tidak dikuasai oleh salah satu sekolah sampel

Pada mata pelajaran bahasa Indonesia persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 22%; 26%; dan 36% pada tahun 2008/2009 adalah 14%; 28%, 38% serta pada tahun 2009/2010 adalah 26% untuk paket A dan 10% untuk paket B; 28% untuk paket A dan B; 26% untuk paket A 30% dan 28% untuk paket B.

Pada mata pelajaran bahasa Inggris persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih

sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 22%; 48%; dan 48% pada tahun 2008/2009 adalah 8%; 38%, 80% serta pada tahun 2009/2010 adalah 0% untuk paket A dan 6% untuk paket B; 10% untuk paket A dan 44% untuk paket B; 8% untuk paket A dan 12% untuk paket B.

Pada mata pelajaran matematika persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 32,5%; 34,5%; dan 37,5% pada tahun 2008/2009 adalah 0%; 25%, 32,5% serta pada tahun 2009/2010 adalah 2,5% untuk paket A dan 5% untuk paket B; 17,5% untuk paket A dan B; 17,5% untuk paket A dan 7,5% untuk paket B.

Pada mata pelajaran ekonomi, persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 5%; 40%; dan 30% pada tahun 2008/2009 adalah 10%; 30%, 37,5% serta pada tahun 2009/2010 adalah 25% untuk paket A dan 20% untuk paket B; 40% untuk paket A dan 47,5% untuk paket B; 27,5% untuk paket A dan 25% untuk paket B.

Pada mata pelajaran geografi, persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 25%; 62,5%; dan 35% pada tahun 2008/2009 adalah 12,5%; 32,5%, 40% serta pada tahun 2009/2010 adalah 32% untuk paket A dan 30% untuk paket B; 38% untuk paket A dan 32 untuk paket B; 26% untuk paket A dan 26% untuk paket B.

Pada mata pelajaran sosiologi persentase jumlah kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada tahun 2007/2008 berturut-turut untuk SMA Negeri I Dumai sebagai sekolah yang berkualitas tinggi, SMA Negeri 2 Tanah Putih sebagai

sekolah berkualitas sedang, dan SMA Negeri I Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai sekolah berkualitas rendah adalah 17,5%; 35%; dan 37,5% pada tahun 2008/2009 adalah 17,5%; 42,5%, 50% serta pada tahun 2009/2010 adalah 32% untuk paket A dan 30% untuk paket B; 38% untuk paket A dan 34% untuk paket B; 30% untuk paket A dan 24% untuk paket B.

C. Faktor Penyebab Tidak dikuasai Kompetensi oleh Peserta Didik

Faktor penyebab tidak dikuasainya beberapa kompetensi di sekolah yang ada di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir untuk setiap mata pelajaran yang diuji secara nasional akan dianalisis menggunakan diagram tulang ikan dan mengacu kepada standar pendidikan nasional yang dijabarkan dalam standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Masing-masing standar dianalisis dari jawaban angket, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada guru. Analisis faktor penyebab diidentifikasi pada setiap mata pelajaran (Lampiran 5).

a. Standar Isi

Guru belum menggunakan silabus, RPP, maupun LKS yang dirancang sendiri sesuai dengan tuntutan KTSP, melainkan masih menggunakan silabus, RPP, maupun LKS yang tersedia di pasaran atau sumber lainnya. Disamping itu ada beberapa RPP yang dibuat sendiri oleh guru tetapi dalam membuat RPP tersebut guru tidak berpedoman pada silabus yang ada. Jika RPP yang tidak mengacu pada silabus, tentu standar kompetensi/kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam standar isi tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan dan tidak adanya buku pedoman tentang tata cara mengembangkan silabus dan perangkat pembelajaran yang benar, sehingga guru tersebut masih kurang terampil dalam mengembangkan silabus maupun perangkat pembelajaran. Silabus dan perangkat pembelajaran bagi guru hanya sebatas melengkapi administrasi.

b. Standar Proses

Guru belum menggunakan model pembelajaran yang konstruktivistik seperti *cooperative learning* atau *student-centered* melainkan masih menggunakan model pembelajaran konvensional seperti ceramah dan pemberian tugas (tugasnya belum direncanakan dengan baik)

Guru belum menggunakan media pembelajaran, apalagi media pembelajaran yang berbasis IT. Beberapa guru sudah menggunakan Laptop dalam mengajar, namun penggunaan media ini baru sebatas guru tidak menulis lagi di papan tulis. Penggunaan media belum melibatkan siswa dan belum menyampaikan pesan yang menarik.

c. Standar Kompetensi lulusan

Guru belum memberikan pengalaman belajar yang membuat siswa aktif dan kreatif, seperti mencari informasi dari berbagai sumber, memanfaatkan lingkungan, mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya, rasa percaya diri, menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif, menghargai perbedaan pendapat, menghasilkan karya kreatif dan sebagainya. Hal ini dapat disebabkan karena standar proses dan standar isi yang lemah, sehingga berdampak pada standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran yang tidak inovatif dan guru yang lebih aktif (*Teacher Centered Learning*) mengakibatkan siswa merasa jenuh dan tidak sepenuhnya mampu menyerap materi yang diajarkan. Pembelajaran yang masih bersifat behavioristik sehingga siswa tidak mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari- hari.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Guru masih ada guru yang berijazah dibawah S1/D4 dan mengajar tidak pada bidangnya. Misalnya guru bidang studi Bahasa mengajar Fisika, guru bidang studi bahasa mengajar Sosiologi. Umumnya dalam mengajar guru hanya menyampaikan materi pelajaran seperti apa yang tertulis dalam buku, belum menjelaskan konsep keilmuannya karena guru belum menguasai pola pikir keilmuannya. Sebagian guru sudah memiliki sertifikat pendidik,

tetapi dalam kegiatan pembelajaran masih sama dengan guru yang belum mempunyai sertifikat.

Kepala sekolah umumnya berpendidikan S1, sebahagian sudah memiliki sertifikat pendidik tapi sebahagian masih ada yang belum karena pengalaman mengajarnya yang masih baru. Kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas 1-4 kali dalam satu semester dan tidak disertai diskusi, biasanya tetapi tidak terarah, Pada suatu sekolah yang dikunjungi masalah menejerial sekolah yang seharusnya ditangani oleh kepala sekolah tapi diselesaikan oleh wakil kepala sekolah, hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan menejerial kepala sekolah dan kepala sekolah merupakan putra daerah.

Tenaga Kependidikan disemua sekolah hanya kepala tenaga administrasi yang mempunyai staf tetapi untuk perpustakaan dan laboratorium kepala merangkap staf. Disamping itu yang menjadi kepala laboratorium dan kepala perpustakaan adalah guru bidang studi yang tidak menjabat sebagai guru kelas. Hanya di sekolah-sekolah binaan atau sekolah RSBI yang mempunyai tenaga laboratorium yang bidang tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, itupun pendidikannya DII.

e. Standar sarana dan prasarana

1. Hampir seluruh sekolah tidak memiliki luas lahan minimal dibandingkan dengan rasio jumlah siswa, sehingga ada beberapa sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar dua sif dimana siswa kelas 1 memulai kegiatan belajar mengajarnya pada siang hari
2. Ada beberapa sekolah air bersih masih menjadi masalah, pada musim panas sumur-sumur yang merupakan satu-satunya sumber air mengering sedangkan pada musim hujan ada beberapa sekolah yang digenangi air yang mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar karena kurang baiknya sanitasi diluar bangunan terkait saluran air hujan.
3. Ada beberapa sekolah tidak memiliki instalasi dan kapasitas listrik yang memadai karena listrik dari PLN tidak ada.
4. Semua sekolah tidak mempunyai ruang khusus yang dibuat untuk perpustakaan. Ruangan kelas yang tidak dipakai untuk belajar karena sudah dibangun kelas baru atau memang suatu ruangan yang diambil dan dijadikan perpustakaan untuk memenuhi suatu ketentuan bahwa sekolah harus mempunyai perpustakaan. Perpustakaan hanya berisi beberapa rak buku yang berisi beberapa buku, beberapa

meja dan kursi untuk siswa membaca buku. Buku-buku yang tersedia juga tidak banyak baik dari segi jumlah maupun dari segi judul dan terlihat sudah usang dan kurang sesuai dengan tuntutan materi yang akan diajarkan. Perpustakaan terlihat tidak ramai dikunjungi oleh siswa, karena kondisi ruangan yang kurang nyaman dengan ruangan yang sedikit gelap dan hampir tidak ada yang menjalankan piket pustaka.

5. Belum ada sekolah yang memiliki laboratorium bahasa, yang ada baru laboratorium IPA. Kapasitas isi ruang laboratorium IPA serta sarana pendukung tidak sesuai dengan ketentuan. Ruang laboratorium hanya satu, untuk mata pelajaran kimia, fisika, dan biologi sedangkan disekolah lain ada yang tidak mempunyai ruang laboratorium.
6. Sebahagian sekolah sudah mempunyai ruang pimpinan, guru, TU, konseling, UKS tetapi luas ruangan dan sarana pendukungnya tidak sesuai ketentuan. Di beberapa sekolah satu ruangan disekat-sekat menjadi ruang pimpinan, TU, konseling, UKS dan guru. Di ruangan guru, masing-masing guru hanya mendapatkan tempat $\pm 1\text{m} \times 1,5\text{m}$, tempat meletakkan meja dan kursi. Meja guru digunakan untuk menulis dan meletakkan buku-buku tugas siswa yang akan dinilai.
7. Beberapa sekolah tidak mempunyai ruang khusus yang dipakai sebagai ruang ibadah. Ada sekolah yang mempunyai ruang ibadah khusus, tetapi luas dan sarana pendukungnya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga setiap akan melaksanakan sholat guru piket harus mengatur urutan kelas yang akan melaksanakan sholat. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan yang melibatkan seluruh anggota sekolah tidak dapat dilaksanakan ditempat ibadah, biasanya digelar di lapangan sekolah
8. Kebanyakan sekolah tidak mempunyai ruang khusus yang dipakai sebagai ruang olahraga. Biasanya sekolah hanya mempunyai lapangan basket, yang terletak dilapangan depan sekolah yang biasanya digunakan juga untuk upacara bendera setiap hari senin. Untuk kegiatan olahraga biasanya guru membawa siswa berolahraga kelapangan olahraga yang dimiliki masyarakat.

f. Standar pengelolaan

Umumnya sekolah sudah mempunyai Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Setiap tahun, sekolah membuat perencanaan tentang kegiatan- kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya tidak

berjalan dengan semestinya, hal ini dapat disebabkan oleh kondisi keuangan, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, waktu dan lain- lain. RKT yang dibuat adalah yang ideal tanpa memperhatikan keadaan sekolah. Seakan-akan RKT dibuat untuk memenuhi syarat administrasi sekolah. Disamping itu sistem manajemen informasi sekolah yang kurang baik dan sekolah tersebut hanya mengadakan satu kali evaluasi program mengenai kegiatan sekolah dan kinerja pendidik. Hasil evaluasi juga tidak ditindak lanjuti.

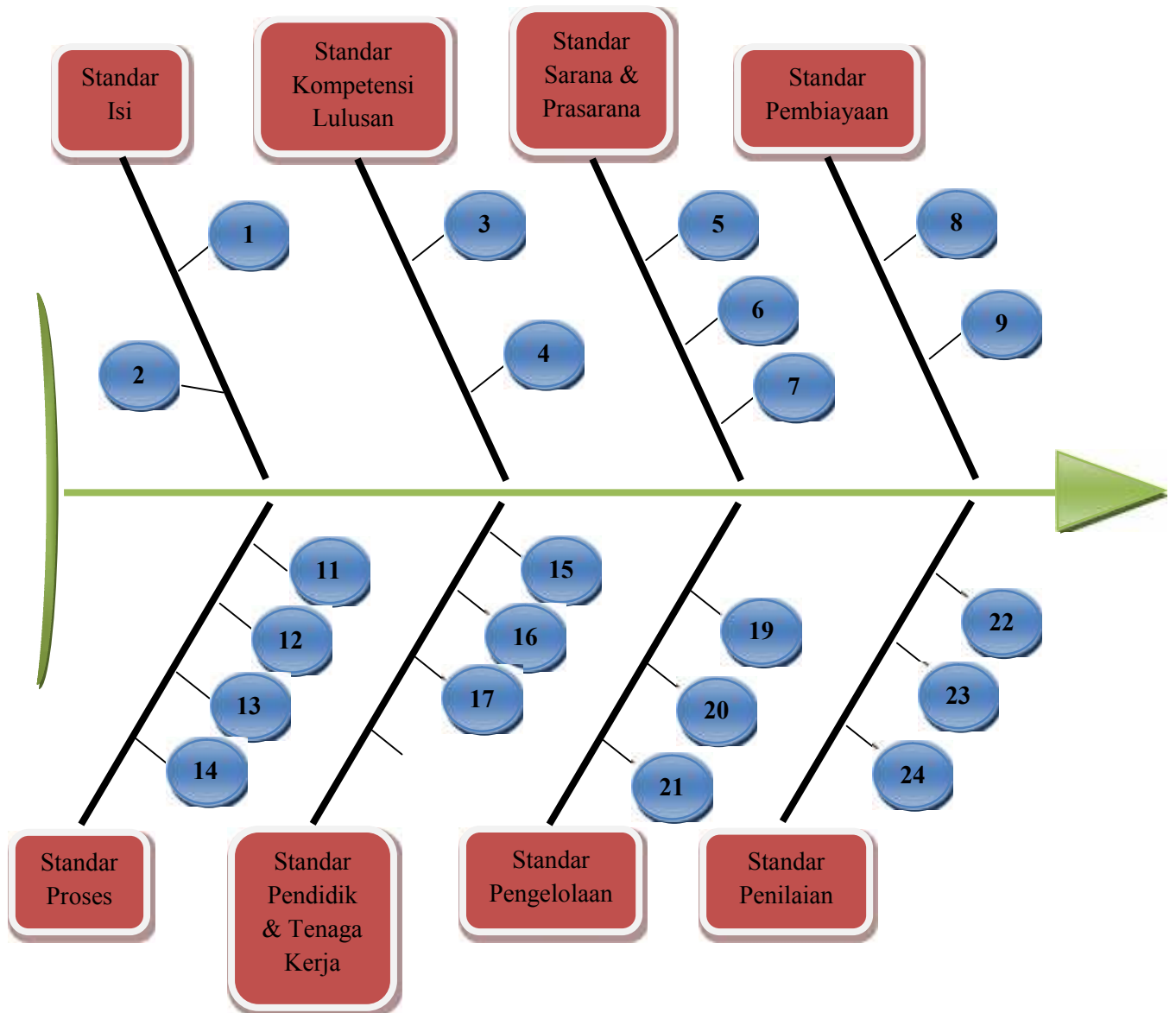
g. Standar Pembiayaan

Sekolah tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk mengembangkan tenaga pendidik mereka, seperti untuk mengikuti pelatihan, seminar dan sejenisnya. Kecil sekali dana yang dialokasikan untuk kegiatan kesiswaan, sehingga siswa jarang sekali yang mengikuti kegiatan diluar daerah seperti mengikuti olimpiade, kejuaraan-kejuaraan olah raga dan seni. Sekolah tidak dapat memungut biaya selain uang sekolah karena kondisi ekonomi masyarakat yang rendah.

h. Standar Penilaian

Teknik penilaian pada silabus tidak sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar, instrumen dan pedoman penilaian tidak sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian dan penilaian hasil belajar tidak bersifat otentik masih menggunakan asesmen tradisional (tes tertulis), tes tertulis yang dilakukan belum termasuk kategori berfikir tingkat tinggi. Hasil penilaian tidak ditindak lanjuti. Remedial yang mereka maksud adalah ujian ulangan pada saat menjelang menerima rapor atau setelah ujian semester dilaksanakan. Hasil ujian nasional yang diterima sekolah hanya nilai siswa untuk setiap mata pelajaran. Sehingga guru masing-masing bidang studi tidak mengetahui soal mana yang tidak bisa dijawab oleh setiap siswa dan kompetensi mana yang belum dikuasai siswa. Faktor penyebab tidak dikuasai kompetensi oleh peserta didik secara singkat dapat dilihat pada diagram tulang ikan (*Fishbone Diagram*) pada halaman 29 di bawah ini.

Gambar 3 Faktor Penyebab Tidak dikuasai Kompetensi Oleh Peserta Didik



Keterangan :

1. KTSP tidak dikembangkan sekolah
2. Silabus masih mengkopi dari sumber lain
3. Tidak ada pengalaman yang bervariasi / masih tradisional
4. Ada mencari informasi dari sumber lain tetapi masih sedikit
5. Kurang bahan bacaan
6. IPA kurang optimal dan bidang studi lain baku
7. Kurang media pembelajaran
8. Tidak ada subsidi silang
9. Tidak ada anggaran pengembangan pendidik
10. Tidak membuat perangkat sendiri
11. Ada pemantauan kepala sekolah tetapi tidak ada tindak lanjut
12. Mengajar tidak mengacu pada RPP

13. Kurang menggunakan media alami, buatan maupun IT
14. Pembelajaran kurang inovatif
15. Pola pikir keilmuan guru yang baik
16. Masih ada guru yang belum strata I
17. Mengajar tidak semua bidang
18. Tenaga kependidikan berasal dari guru
19. Kegiatan kurang sesuai RKT
20. Sistem informasi kurang baik
21. Melakukan 1 kali evaluasi program tetapi tidak ada tindak lanjut
22. Kurang autentik
23. Kurang penilaian saat diskusi
24. Remedial teaching hanya ulangan ujian pada saat terima raport.

D. Alternatif Pemecahan Untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik

Berdasarkan masalah yang terdapat pada standar pendidikan di kota Dumai dan kabupaten Rokan Hilir yang menyebabkan mutu pendidikan di daerah ini belum sesuai dengan harapan, hal ini ditandai dengan masih adanya kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Untuk itu diperlukan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan standar pendidikan dan akan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan

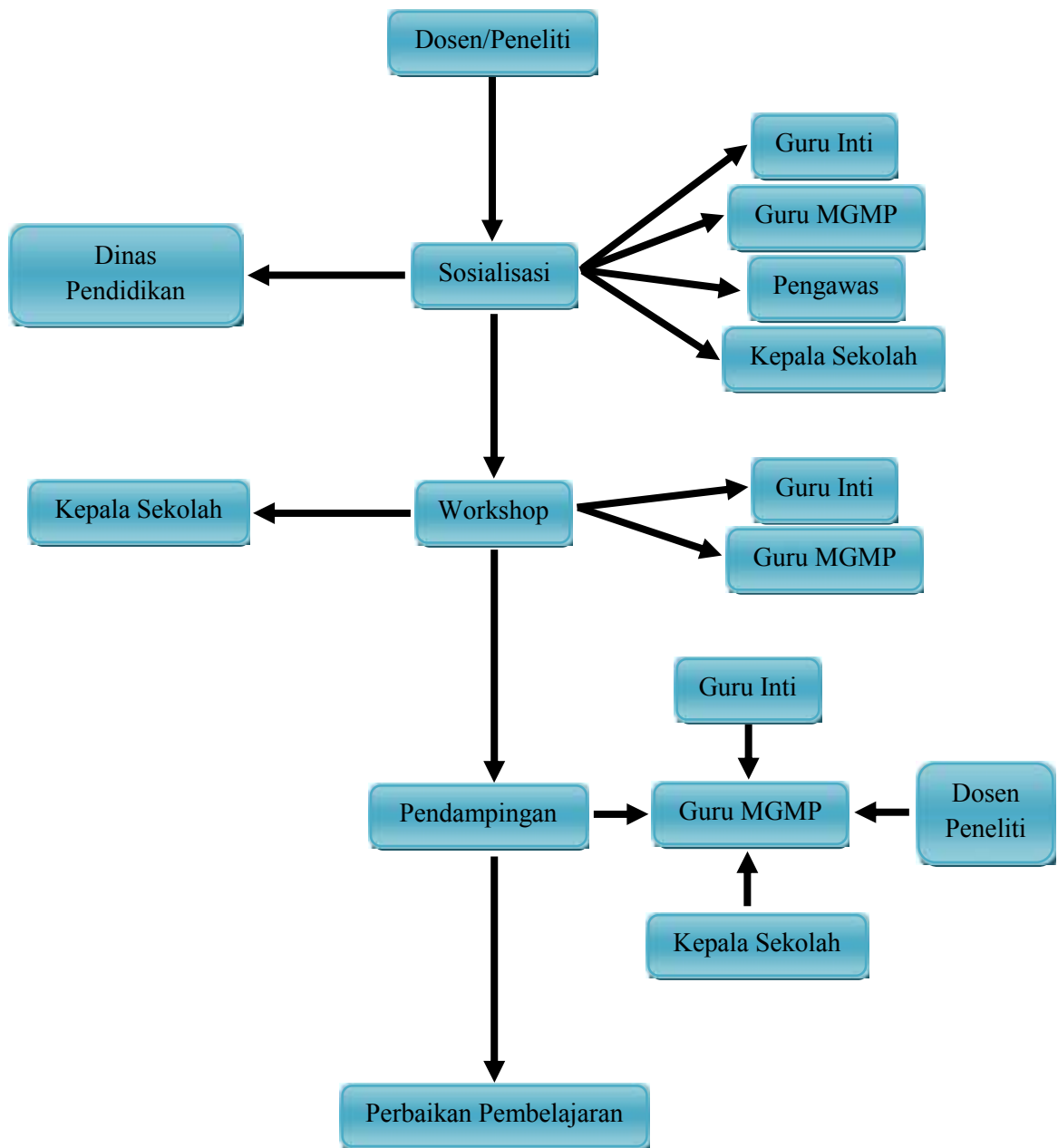
Alternatif pemecahan masalah yang akan dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan dana DP2M dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (a) Sosialisasi KTSP kepada MGMP dan diikuti oleh guru inti, kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
- (b) Workshop pengembangan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, LKS, bahan ajar, lembar penilaian, media pembelajaran) dan pemantapan/pendalaman materi kepada MGMP dan diikuti oleh guru inti, kepala sekolah, dan pengawas kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
- (c) Pembimbingan penerapan perangkat pembelajaran (RPP, LKS, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, dan Lembar penilaian di kelas oleh MGMP dibawah bimbingan guru inti dan peneliti.

E. Model Implementasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan alternatif pemecahan masalah di atas, maka model implementasi kegiatan menggunakan pendekatan kelompok dengan metode diskusi, simulasi dan ujicoba. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk implementasi program ini adalah sebagai berikut:

1. Diskusi dengan ketua MGMP kota Dumai dan kabupaten Rokan Hilir dengan melibatkan Dinas Pendidikan untuk merencanakan teknis kegiatan.
2. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dan workshop. Workshop bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dan pemantapan/pengembangan materi pelajaran sedangkan untuk pengawas dan guru inti untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping guru dalam implementasi program.
3. Pembimbingan akan dilakukan berkelompok sesuai mata pelajaran dalam waktu satu semester terhitung ganjil 2012. Kegiatan dimulai dengan melakukan simulasi di depan teman-teman kelompok MGMP kemudian dilanjutkan di kelas. Evaluasi akan dilakukan diakhir semester untuk dikembangkan menjadi program yang lebih baik sehingga dapat dijadikan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan di kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Skema konseptual model implementasi pemecahan masalah dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Skema Konseptual Model Implementasi Untuk Meningkatkan Kompetensi peserta Didik di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir

Skema konseptual model implementasi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Sosialisai

Sosialisasi dalam model implementasi ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengawas, kepala sekolah, guru inti dan guru serta dinas pendidikan kota dan kabupaten tentang KTSP karena pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak sekolah yang merasa sulit untuk mengimplementasinya. Kebingungan para kepala sekolah dan juga para guru merupakan bukti bahwa perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens.

Materi yang disajikan pada sosialisasi ini adalah; landasan penyusunan KTSP; prinsip dan acuan pengembangan KTSP; komponen KTSP; struktur KTSP; pelaksanaan pengembangan KTSP; prinsip dan ciri kegiatan belajar mengajar dalam KTSP; dan contoh pengembangan KTSP.

Peserta dalam sosialisasi KTSP ini adalah pengawas, kepala sekolah, guru inti dan guru serta dinas pendidikan.

- a. Pengawas adalah semua pengawas yang berada di bawah naungan pendidikan kota Dumai dan kabupaten Rokan Hilir.
- b. Kepala sekolah adalah semua kepala sekolah yang ada di kota Dumai dan kabupaten Rokan Hilir.
- c. Guru dan guru inti adalah semua guru yang tergabung dalam MGMP di kota Dumai dan kabupaten Rokan Hilir.
- d. Dinas pendidikan adalah staf dinas pendidikan di kota Dumai dan kabupaten Rokan Hilir yang menaungi permasalahan kurikulum

2. Workshop

Workshop bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, LKS, bahan ajar, lembar penilaian, media pembelajaran) untuk masing-masing sekolah untuk setiap mata pelajaran dan pemantapan/pendalaman materi kepada guru MGMP.

a. Pemantapan/pendalaman materi

Sebelum kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, terlebih dahulu diberikan pelatihan pemantapan/pendalaman materi terutama materi-materi yang

sering keluar pada ujian nasional. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, umumnya guru hanya menyampaikan materi sesuai dengan yang tertulis di buku tanpa memahami pola pikir keilmuannya, sehingga belajar bagi siswa hanya setumpuk materi yang harus dipahami dan dihafal tanpa memaknainya.

b. Pengembangan perangkat pembelajaran

Pengembangan perangkat pembelajaran dimulai dari mengembangkan silabus, RPP, LKS, Media Pembelajaran dan lembar penilaian.

1). Pengembangan silabus

Kegiatan dimulai dengan menjelaskan landasan pengembangan silabus, prinsip pengembangan, dan langkah-langkah teknis pengembangan silabus kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengembangkan silabus berkelompok mata pelajaran di bawah bimbingan tim peneliti. Setelah silabus masing-masing mata pelajaran selesai dibuat, maka akan diadakan presentasi untuk menerima masukan-masukan dari para peserta untuk penyempurnaan silabus yang dibuat.

2). Pengembangan RPP, LKS, dan lembar penilaian

Kegiatan ini dimulai dengan menjelaskan model-model pembelajaran inovatif yang berlandaskan pendekatan konstruktivisme, menjelaskan konsep pengembangan LKS dan lembar penilaian. Kegiatan selanjutnya adalah ngkat ing- kelompok mata pelajaran guru padamatoleh mapembelajaran dibuamengembangkan perangkat pembelajaran (RPP, LKS, dan lembar penilaian) untuk setiap mata pelajaran di bawah bimbingan tim peneliti. Setelah perangkat selesai dibuat, masing-masing peserta akan mempresentasikan hasilnya untuk perbaikan dan penyempurnaan. Kegiatan selanjutnya adalah simulasi di masing-masing kelompok sebelum peser mengujicoba perangkat di kelas sesungguhnya.

3. Mengembangkan Media Pembelajaran

Kegiatan ini dimulai dengan menjelaskan tentang jenis-jenis media, bentuk media dan media berbasis IT. Kemudian melatih membuat media alami, buatan dan berbasis IT

3. Pembimbingan

Pembimbingan dilakukan sewaktu guru mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan oleh masing-masing guru di kelas.

Pembimbingan diperlukan karena kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan guru merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan guru di kelas. Agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah yang disusun dalam RPP maka perlu diobserverasi. Observasi dilakukan oleh peneliti sesuai bidang studi masing-masing dan diikuti oleh guru inti serta kepala sekolah, setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan tim peneliti memberikan masukan-masukan untuk perbaikan pembelajaran. Kegiatan pembimbingan oleh tim peneliti hanya dilakukan diawal kegiatan selanjutnya pembimbingan dilakukan oleh guru inti dan kepala sekolah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut

1. Rata-rata kompetensi yang tidak mencapai nilai kelulusan untuk kelompok IPA pada tiga sekolah sampel berturut-turut dari tahun 2007/2008- 2009/2010 adalah antara 2,5% sampai 50%; 0% sampai 68%; dan 0% sampai 42,5%. Dan untuk kelompok IPS antara 5% sampai 62,5%; 0% sampai 80%; dan 0% sampai 40%.
1. Faktor penyebab berasal dari rendahnya beberapa aspek pada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.
2. Alternatif Model Pemecahan Masalah:
 - a. Sosialisasi KTSP kepada MGMP dan diikuti oleh guru inti, kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan pemantapan/pendalaman materi kepada MGMP dan diikuti oleh guru inti, kepala sekolah, dan pengawas kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
 - c. Pendampingan penerapan perangkat pembelajaran di kelas oleh MGMP dibawah bimbingan guru inti dan peneliti.

B. Rekomendasi

Model pemecahan masalah yang diusulkan akan dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan dana DP2M Dikti dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Kabupaten Rakan Hilir

DAFTAR PUSTAKA

- BSNP. 2010. *Laporan Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010*. Depdiknas. Jakarta
- BSNP. 2011. *Sosialisasi Penyelenggaraan UJIAN NASIONAL 2011 bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs-SMPLB-SMA/MA-SMALB-SMK*. Depdiknas. Jakarta
- Edward, Sallis. 1993. *Total Quality Management in Education. Kogan Page Educationnal Management Series. London*.
- Oliver, Paul (Ed.). 1996. *The Management of Educational Change*. Ashgate Publishing Comani. USA.
- Rich, John Martin. 1988. *Inovation in Education: Revormersand Their Critic*. Allyn and Bacon.
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Umar, La Sulo. 1994. *Pengantar Pendidikan*. Dirjen Dikti Depdiknas. Jakarta
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

LAMPIRAN

Lampiran I

Instrumen Penelitian Pemetaan

Lampiran 2

Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran

Lampiran 3

Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran

Lampiran 4

Jawaban Angket Penelitian Pemetaan

Lampiran 5

Personalia Pelaksana Kegiatan Penelitian Beserta Kualifikasi